



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELNAWISAH
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 281223

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/120 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/270 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/180 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/72 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 455 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KOTA SOLOK , WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 144.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	217.837.513
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.687.837.513
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.687.837.513

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.